

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program pendidikan di UMA dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang disusun sesuai dengan kebutuhan serta ruang lingkup program studi. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Program studi akuntansi merupakan program pendidikan yang ada di Fakultas Ekonomi. Program studi ini bertujuan untuk menyiapkan mahasiswanya untuk menjadi calon sarjana akuntansi yang profesional dan berkompoten. Mahasiswa di program studi Akuntansi menerima mata kuliah-mata kuliah sesuai dengan kurikulum (FE-UMA, 2012).

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanpa dukungan biaya pendidikan yang memadai, maka proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, universitas sebagai wadah penyelenggara pendidikan harus bisa mengelola/mengatur biaya pendidikannya dengan baik. Dimana universitas harus bisa memperoleh dana untuk kelangsungan proses kegiatan belajar mengajar, tetapi tanpa membebankan semua biaya pendidikannya kepada mahasiswanya agar mahasiswa yang ekonominya terbatas tetap dapat menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Tingginya keinginan masyarakat terutama masyarakat usia produktif untuk mendapatkan ilmu pengetahuan semakin mendorong pengelola

jasa pendidikan menyediakan sarana pendidikan dengan berbagai fasilitas. Perguruan tinggi yang unggul dikenali dari koleksi perpustakaan yang lengkap, akses internet, biaya yang wajar, promosi yang mengesankan, dan *image* yang baik (Putri, 2011:26).

Dalam upaya menyelenggarakan dan meningkatkan sistem pendidikan yang berkualitas, biaya merupakan komponen yang sangat penting, dan dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Dalam konteks perencanaan pendidikan, pemahaman tentang anatomi dan problematika pembiayaan pendidikan baik pada tingkat makro maupun mikro sangatlah diperlukan. Berdasarkan pemahaman di atas, dapatlah dikembangkan kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih tepat dan adil serta mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif (Supriadi, 2006:25).

Untuk menciptakan kelangsungan penyelenggaraan perkuliahan, maka diperlukan subsidi/bantuan dari berbagai elemen. Subsidi ini biasanya dalam bentuk beasiswa yang sangat berarti khususnya bagi para mahasiswa yang kurang mampu tentunya demi kelangsungan pendidikan yang sedang dijalaninya agar dapat memperoleh gelar sarjana. Disamping itu, Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan dan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Penerapan ketentuan dalam undang-undang ini diharapkan dapat mendukung segala upaya untuk memecahkan masalah pendidikan, guna memberikan